

RINGKASAN

**Irwansyah : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
NIM 247410101015 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BANDA ACEH NOMOR 15/PID.SUSTPK/2024/PN
BNA KAJIAN ASPEK HUKUM PIDANA**

(Prof. Dr. Faisal, S.Ag.,S.H., M.Hum. dan Dr. Joelman Subaidi, S.H.,M.H.)

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan insentif pajak daerah yang menimbulkan perdebatan terkait penerapan unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan dan asas-asas hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*). Namun, berdasarkan analisis penulis, terdapat fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pemberian dan pengelolaan insentif pemungutan pajak daerah, termasuk pemberian insentif kepada pihak yang tidak secara langsung melakukan pemungutan pajak, pengembalian dana secara kolektif, serta adanya kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP. Selain itu, penerapan Pasal 18 mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan pencabutan hak tertentu pada prinsipnya merupakan instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. kesimpulan bahwa putusan bebas dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum yang substantif karena hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan legalistik formal dibandingkan menilai substansi penyalahgunaan kewenangan dan dampak kerugian negara yang timbul.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Kewenangan, Kerugian Negara.

ABSTRACT

Irwansyah : LEGAL ANALYSIS OF THE DECISION
NIM 247410101015 BANDA ACEH CORRUPTION COURT NUMBER
15/PID.SUSTPK/2024/PN/2024/PN BAN KAAHAN
CRIMINAL LAW ASPECTS

(Prof. Dr.Faisal, S.Ag., S.H., M.H. dan Dr. Joelman Subaidi, S.H.,M.H)

Acquittal in the case of corruption, tax incentive management. The region that has given rise to debate, related to the application of elements of corruption. Therefore, this study aims to analyze the application of Article 2 paragraph (1), Article 3, and Article 18 of Law Number 20 of 2001 as an amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in Court Decisions, Corruption Crimes, Banda Aceh Number 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, analyzing the judge's considerations in deciding the case, and assessing the suitability of the decision with the principles of justice, and the principles of criminal law in Indonesia. The type of research used is normative juridical research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study indicate that the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Eradication Law in Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna gives rise to different interpretations of the elements of contravening the law, abuse of authority, and state financial losses. The panel of first-instance judges is of the opinion that the elements of the crime of corruption have not been legally and convincingly proven so that the defendant is acquitted. (szispraak). However, based on the author's analysis, there are trial facts that indicate irregularities in the provision and management of regional tax collection incentives, including the provision of incentives to parties who do not directly collect taxes, collective refunds. In addition, there are state losses based on the results of the BPKP audit. In addition, the application of Article 18 regarding additional criminal penalties in the form of payment of replacement money. Asset confiscation and the revocation of certain assets are, in principle, important instruments in recovering state losses resulting from corruption. In conclusion, the acquittal in this case does not fully reflect the substantive application of the law because the judge placed more emphasis on a formal legalistic approach than on assessing the substance of the abuse of authority and the resulting state losses.

Keyword: *Corruption, Judge's Decision, Abuse of Resources, State Losses.*